



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Biro Administrasi Pimpinan;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Perekonomian;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Biro Administrasi Pembangunan;
- h. Biro Organisasi; dan
- i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana strategis dinas yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Renja ini juga mengacu dari Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja berpedoman pada program dan kegiatan perangkat daerah dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026, serta Renstra-PD tahun 2021-2026.

Penetapan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada APBD tahun 2026 yang akan didanai dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini.

Palangka Raya, 1 Agustus 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



NORHANI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670626 199003 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	4
 BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
 BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	 47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Penyelarasan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah	51
3.4 Program dan Kegiatan.....	54
 BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	 56
 BAB V Penutup.....	 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 ...	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 2.3	Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	34
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah	53
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diamanatkan bahwa satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD.
2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah; evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun.
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang. Pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perdagangan dan Industri dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kemudian menyusun Rencana

Kerja di bidang perdagangan dan industri kemudian rancangan akhir dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja di bidang perdagangan dan industri sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang perdagangan dan industri dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta sasaran dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

- a. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

- i. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/020/TAPD/2025, Tanggal 26 Juni 2025, Tentang Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah ini sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan sektor perdagangan dan perindustrian khususnya di Kalimantan Tengah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perdagangan dan perindustrian untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Penyelarasan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

3.4. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada Tahun 2024 Total Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 225.412.009.655,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 222.990.853.616,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.421.156.039,-. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perdagangan

Pencapaian kinerja program urusan Perdagangan melalui strategi meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah, meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng, meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri dan meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta arah kebijakan peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan Kalteng, peningkatan stabilitasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi, peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional dan penumbuhan eksportir baru dan peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang, serta pengawasan perdagangan barang dan jasa illegal.

1.1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang antara lain program ini bertujuan meningkatkan pengendalian distribusi bahan berbahaya dan layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kalimantan Tengah. Pagu

anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.090.000,- atau 96,36%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya dan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang mendukung program ini :

- a. Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, alokasi anggaran murni untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dan pada anggaran perubahan kegiatan ini dinolkan.
- b. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.090.000,- atau 96,36%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal, target 1 dokumen, dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.

1.2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang antara lain program ini bertujuan meningkatkan distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Kalimantan Tengah serta memberdayakan konsumen. Pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 29.286.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.065.730,- atau 92,42%,. *Outcome* program adalah meningkatnya kualitas distribusi perdagangan di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang mendukung program ini : Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.286.100,- dan realisasi sebesar Rp. 27.065.730,- atau 92,42%. *Output* kegiatan adalah tersedianya informasi sarana distribusi perdagangan dan pemasaran produk potensial di 14 Kab/Kota, target 2 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen.

1.3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Pencapaian kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada tahun 2024 dengan Jumlah alokasi anggaran Rp. 189.613.130.736,- realisasi anggaran Rp. 189.372.238.768,- atau 99,87%, dan 3 kegiatan. *Outcome* program adalah Terjaminnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kegiatan yang mendukung program ini :

- a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi, alokasi anggaran untuk kegiatan ini

sebesar Rp. 82.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 75.267.613,- atau 91,79%. *Output* kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor dalam satu tahun 2 Laporan dengan realisasi 1 Laporan.

- b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dan Sistem Informasi Perdagangan, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 189.511.130.736,- dan realisasi sebesar Rp. 189.278.711.155,- atau setara dengan 99,88%. *Output* kegiatan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota dalam satu tahun dengan realisasi 1 Laporan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dalam satu tahun 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan, dan Jumlah paket sembako yang sudah disalurkan pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok sebanyak 1.083.500 paket.
- c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.260.000,- atau setara dengan 91,30%. *Output* kegiatan Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% dalam satu tahun 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan.

1.4. Program Pengembangan Ekspor

Pencapaian kinerja program Pengembangan Ekspor pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran Rp. 4.105.000.000,- realisasi anggaran Rp. 4.043.406.547,- setara dengan 98,50%, dengan jumlah kegiatan 1. *Outcome* program adalah meningkatnya nilai ekspor barang dan jasa serta surplus perdagangan luar negeri Kalteng. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, alokasi dan realisasi anggaran seperti tersebut di atas. *Output* kegiatan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang dalam satu tahun 2 pelaku usaha dengan realisasi 9 pelaku usaha, dengan mengikuti Pameran The 26th Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE) 2024 di Tokyo, Jepang, dan Pameran The 5th

Lifestyle Week Osaka 2024 di Osaka, Jepang. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan dalam satu tahun 2 pelaku usaha dengan realisasi 2 pelaku usaha dengan mengikuti Singapore – Indonesia Business Expo Forum 2024 di Jakarta dan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi dalam satu tahun 2 produk dengan realisasi 2 produk.

1.5. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

Pencapaian kinerja program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran Rp. 1.954.687.150,- realisasi anggaran Rp. 1.663.834.733,- setara dengan 85,12%, dengan jumlah kegiatan 3. *Outcome* program adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan; Jumlah jenis barang dan jasa yang beredar diawasi, Jumlah contoh/sampel komoditi ekspor yang akan diuji dan Jumlah UUT (alat ukur) yg dikalibrasi. Kegiatan yang mendukung program ini adalah

- a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 545.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 328.916.742,- atau setara dengan 60,35%. *Output* kegiatan umah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif dalam satu tahun 1 BPSK dengan realisasi 1 BPSK, dan Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani dalam satu tahun 6 pengaduan dan terealisasi.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 909.687.150,- dan realisasi sebesar Rp. 850.337.578,- atau setara dengan 93,48%. *Output* kegiatan Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan dalam satu 750 sertifikat dan terealisasi 896 sertifikat, Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan dalam satu tahun 756 laporan dan terealisasi 52 laporan, Jumlah produk potensial yang dipantau dalam satu tahun 5 produk dan terealisasi 1 produk, dan Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan dalam satu 1 sertifikat untuk tahun 2024 belum ada, tahun 2025 diterbitkan.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten /Kota, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 484.580.413,- atau setara dengan 96,92%. *Output* kegiatan Jumlah dokumen pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah dalam satu tahun 2 dokumen dengan realisasi 1 dokumen

1.6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pencapaian kinerja program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Tahun 2024 dengan alokasi anggaran Rp. 1.130.000.000,- realisasi anggaran Rp. 1.061.820.083,- setara dengan 93,97%, dengan jumlah kegiatan 3. *Outcome* program adalah meningkatnya jumlah pelaksanaan promosi produk dalam negeri, jumlah pelaksanaan pemasaran penggunaan produk dalam negeri dan jumlah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 580.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 527.383.983,- atau setara dengan 90,93%. *Output* kegiatan Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri dalam satu tahun 3 UMKM dan realisasi 3 UMKM dan Jumlah promosi produk dalam negeri dalam satu tahun 2 kali dengan realisasi 3 kali dengan mengikuti Pameran dalam rangka peringatan HUT ke – 44 Dekranas Tahun 2024 di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Pameran pada Event Fashion Village Jakarta Fashion & Food Festival 2024 di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan Pameran Indovec Expo di Mega Mall Batam Center, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 487.139.600,- atau setara dengan 97,43%. *Output* kegiatan Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dalam satu tahun 5 UMKM dan realisasi 5 UMKM dan Jumlah pemasaran penggunaan produk dalam negeri dalam satu tahun 2 kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan dengan mengikuti Kalteng Expo Tahun 2024 dan Karnaval Festival Budaya Isen Mulang Tahun 2024.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 47.296.500,- atau setara dengan 94,59%. *Output* kegiatan Jumlah pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri 1 kali dengan realisasi 1 kali dengan melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

2. Urusan Perindustrian

Pencapaian kinerja program urusan Perindustrian melalui strategi meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan serta arah kebijakan yaitu peningkatan daya saing melalui fasilitas pengembangan industri agro dan non agro, peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri, peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan baku pengganti/substitusi impor.

2.1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Pencapaian kinerja program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada tahun 2024 dengan Jumlah alokasi anggaran Rp. 12.149.359.013,- realisasi anggaran Rp. 8.322.621.256,- atau 68,50%, jumlah kegiatan 1. *Outcome* program adalah meningkatnya perkembangan Sentra Industri. Kegiatan yang mendukung adalah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan alokasi anggaran dan realisasi seperti tersebut di atas. *Output* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 dokumen selama satu tahun dengan realisasi 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam satu tahun 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam satu tahun 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen.

2.2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Pencapaian kinerja program Pengendalian Izin Usaha Industri pada tahun 2024 dengan Jumlah alokasi anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi anggaran Rp. 80.335.086,- setara dengan 64,27%, dengan jumlah kegiatan 1. *Outcome* program adalah meningkatnya Jumlah Industri Kalteng yang menggunakan aplikasi SIINAS. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, alokasi anggaran dan realisasi seperti tersebut di atas. *Output* kegiatan Jumlah dokumen informasi industri provinsi sebanyak 2 dokumen dengan realisasi 1 dokumen.

2.3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pencapaian kinerja program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada tahun 2024 dengan Jumlah alokasi anggaran Rp. 104.050.000,- realisasi anggaran Rp. 98.015.720,- setara dengan 94,20%, dengan jumlah kegiatan 1. *Outcome* program adalah meningkatnya Jumlah Industri Kalteng yang

menggunakan aplikasi SIINAS. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), alokasi anggaran dan realisasi seperti tersebut di atas. *Output* kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam satu tahun 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen.

Pada tahun 2024 total anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 225.412.009.655,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 222.990.853.616,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.421.156.039,-.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan pada Tabel 2.1. dibawah ini (menurut Tabel T.C.29 pada lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S.D TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Urusan Pilihan									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keterlaksanaan (%)	100	%						
3.30.01.1.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja	66	Dokumen	11	11	100	11	3	71,21
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku LKIP, laporan tahunan, RKA, LPPD, EKPPD, LKPJ, RKT, PPK, PPS serta bahan rakordal dan renja SKPD	66	Buku	11	11	100	11	3	71,21

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	102	Dokumen	17	17	100	17	3	69,61
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	90	Dokumen	15	15	100	15	3	70,00
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Buku laporan verifikasi keuangan SKPD	6	Buku	1	1	100	1	0	66,67
3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku laporan keuangan akhir Tahun SKPD	12	Buku	2	2	100	2	0	66,67
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	24	Dokumen	4	4	100	4	2	75,00
3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen premi asuransi gedung dan kendaraan Dinas Dagperin	24	Premi	4	4	100	4	2	75,00
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	18	Orang	3	3	100	3	0	66,67

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	36	Dokumen	6	6	100	6	0	88,89
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik kantor dinas	18	Jenis	3	3	100	3	2	77,78
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan penunjang operasional kantor	15	Jenis	15	15	100	15	0	66,68
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (kertas kop, amplop, stopmap) dan penggandaan	30	Jenis	5	5	100	5	1	70,00
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dalam setahun	69.984	Ekspl	11.664	11.664	100	11.664	2.880	70,78
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu selama setahun	600	Kotak	100	100	100	100	5	67,50
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen kegiatan rakor dan konsultasi	84	Dokumen	14	14	100	14	2	69,05
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan pengadaan perlengkapan gedung kanto	84	Unit	14	14	100	14	0	66,67
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penunjang urusan umum kantor	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	7200	Paket	1200	1200	100	1200	0	66,67
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon,internet, air dan listrik	30	Buah	5	5	100	5	2	73,33
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen penunjang pelayanan umum kantor	20	Tekon	20	20	100	20	20	100,00
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	138	Buah	23	23	100	23	5	70,29
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perbaikan peralatan kantor Dagperin	24	Jenis	4	4	100	4	4	83,33

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bahan dan peralatan pemeliharaan bangunan kantor	150	Jenis	25	25	100	25	0	66,67
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan & pendaftaran perusahaan yang terlayani dengan baik (%)	100	%						
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah dokumen usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah dokumen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen SKA dan API	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen koord & sinkronisasi layanan penerbitan SKA	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan jumlah sarana perdagangan di Kalteng meliputi pasar, gudang, distributor dan perdagangan besar (unit)	2462	Unit						
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah dokumen informasi sarana distribusi perdagangan dan pemasaran produk potensial	24	Dokumen	4	4	100	4	0	66,67
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah dokumen data distributor dan pedagang besar se Kalteng	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah dokumen data pasar dan data gudang di Kalteng	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap Bapokting	260	Kegiatan						
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok dan barang penting	33	Jenis	33	33	100	33	33	100,00

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah peserta Rakor kesiapan bahan kebutuhan pokok menjelang HBK	600	Orang	100	100	100	100	0	66,67
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi program perdagangan dalam negeri	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dan Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen daftar harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	1560	Dokumen	260	260	100	260	65	70,83
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	144	Dokumen	24	24	100	24	6	70,83

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa Daerah/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen operasi pasar dan pemeliharaan pasar penyeimbangan	12	Dokumen	2	2	100	2	1	75,00
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen pengawasan pupuk bersubsidi	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah dokumen pengawasan peredaran pupuk bersubsidi	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1. Nilai Ekspor barang dan jasa Kalteng;	2.618,70	Juta US\$						
		2. Surplus perdagangan luar negeri Kalteng	52,91	Juta US\$						

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah dokumen promosi dagang produk ekspor unggulan daerah	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah UKM yang terpilih hasil seleksi dan verifikasi peserta Trade Expo Indonesia	18	UKM	3	3	100	3	0	66,67
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM yang mengikuti misi dagang produk ekspor unggulan	18	UKM	3	3	100	3	0	66,67
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang perdagangan luar negeri	24	Dokumen	4	4	100	4	0	66,67
03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan; Jumlah jenis barang dan jasa yang beredar diawas	108	Pelaku Usaha						
		2. Jumlah contoh/ sampel komoditi ekspor yang akan diuji	1.728	Sampel						

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		3. Jumlah UUT (alat ukur) yg dikalibrasi	607	Alat						
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan perlindungan konsumen di daerah	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67
3.30.06.1.01.001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah dokumen pengawasan perlindungan konsumen	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.06.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengangan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi bidang perlindungan konsumen	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengujian dan sertifikasi mutu produk di daerah	150	Dokumen	25	25	100	25	6	70,67
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah alat standar yang di kalibrasi	60	Unit	10	10	100	10	2	70,00
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen layanan pengujian	24	Dokumen	4	4	100	4	1	70,83
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis	24	Kabupaten	4	4	100	4	1	70,83

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah dokumen layanan sertifikasi	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah dokumen pengawasan barang beredar di daerah	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah operasional badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (Kegiatan)	5	Kegiatan						
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri	12	Kali	2	2	100	2	0	66,67
3.30.07.1.01.0001	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pemasaran penggunaan produk dalam negeri	6	Kali	1	1	100	1	0	66,67
3.30.07.1.02.0001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pemasaran penggunaan produk dalam negeri	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah dokumen informasi produk berpotensi ekspor	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30	Kabupaten	5	5	100	5	0	66,67
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra Industri yang berkembang	50	Unit						
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi	18	Dokumen	3	3	100	3	0	66,67

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan Perda RPIP Kalteng	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen sinkronisasi & pelaksanaan sapras industri	6	Dokumen	1	1	100	1	0	66,67
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	6	Dokumen	1	1	100	1	1	83,33
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin Usaha Industri yang terfasilitasi (%)	100	%						
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen informasi industri provinsi	24	Dokumen	4	4	100	4	0	66,67
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen data industri agro di Kalteng dan dokumen pendataan dan penyusunan database IKM se Kalteng	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67

Kode	Urusan/Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (Renstra PD) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen data industri agro di Kalteng dan dokumen pendataan dan penyusunan database IKM se Kalteng	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Industri Kalteng yang menggunakan aplikasi SIINAS	14	Kabupaten/ Kota						
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen informasi industri provinsi	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data industri agro di Kalteng dan dokumen pendataan dan penyusunan database IKM se Kalteng	12	Dokumen	2	2	100	2	0	66,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Perdagangan dan Industri digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggal 11 Februari 2022, berdasarkan amanat Presiden RI untuk penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah maka dilaksanakan penyetaraan pejabat eselon IV menjadi Pejabat Fungsional Tertentu. Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah jabatan eselon IV yang disetarakan yaitu: Kasubbag Penyusunan Program sebagai JFT Perencana, Kepala Seksi Barang Pokok, Barang Penting dan Distribusi, Kepala Seksi Sarana, Prasarana Distribusi dan Logistik, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar Dan Tertib Niaga, Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen, Kepala Seksi Standardisasi Dan Pengendalian Mutu Barang sebagai JFT Pengawas Perdagangan, Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Produk Dalam Negeri, Kepala Seksi Pengembangan Dan Promosi Komoditi Ekspor, Kepala Seksi Fasilitasi Dan Kerjasama, Kepala Seksi Ekspor Impor sebagai JFT Analisis Perdagangan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tugas pokok membantun Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian;
 3. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan perindustrian;
 4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perindustrian;
 5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas, dengan jabatan Eselon II.a
 2. Sekretaris, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan & Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dengan jabatan Eselon III.a.
 4. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, dengan jabatan Eselon III.a
 5. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, dengan jabatan Eselon III.a.
 6. Kepala Bidang Industri, dengan jabatan Eselon III.a.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk sebagian tugas dan fungsi Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Palangka Raya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) masing-masing terdiri atas : Kepala UPT (eselon III.b), Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis dan Kalibrasi, Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional (Penguji Mutu Barang). UPT BPSMB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, serta pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi. UPT BPSMB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga UPT;

- b. Pemberian pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi, pemberian informasi pelayanan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi;
- c. Pelaksanaan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi, pemeliharaan sistem mutu, evaluasi dan pelaporan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi;
- d. Pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan kalibrasi; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan mutu barang dan sertifikasi mutu barang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD seperti tabel 2.2 (menurut Tabel T-C.30 pada lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan (%)	-		16,10	16,20	16,30	16,40	5,87	15,29	16,30	16,40	
2.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	-		6,05	6,10	6,15	6,20	15,49	1,21	6,15	6,20	
3.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-		7,35	7,40	7,45	7,50	6,72	5,92	7,45	7,50	
4.	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	-		13,60	13,70	13,80	13,90	11,86	12,64	13,80	13,90	
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	-		5,00	5,00	4,00	4,00	6,70	6,64	4,00	4,00	
6.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng (Juta US\$)	-		1.785	1.875	1.969	2.066	4.916,97	3.551	1.969	2.066	
7.	Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	-		5,25	5,50	5,75	6,00	-14,37	-18,79	5,75	6,00	
8.	Pengaduan Konsumen Terkait Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti (%)	-		100	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Peningkatan Sampel Produk yang Memenuhi Standar Uji Mutu (%)	-		11,55	12,12	12,72	13,35	11,68	1,65	12,72	13,35	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM perdagangan dan industri
2. Peningkatan pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan
3. Percepatan pembangunan kawasan industri dan aksesibilitas wilayah
4. Optimalisasi Pendapatan
5. Mewujudkan good governance secara keseluruhan

Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas antara lain :

Kendala Internal

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan pada rumah kemas dan UPTD BPSMB Palangka Raya
4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
6. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan.

Permasalahan eksternal

1. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;
2. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memiliki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
3. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis.

Upaya-upaya pemecahan masalah adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah bidang Ekonomi lainnya dalam rangka sinergitas program dan kegiatan
3. Mendorong peran serta Kabupaten/Kota untuk menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya dan melakukan kegiatan pembinaan/konsolidasi dalam upaya perkuatan industri kreatif berbasis komunitas dan membangun jejaring bisnis antar daerah/wilayah
4. Mendorong standarisasi dan sertifikasi pada produk industri unggulan/masa depan
5. Kecenderungan perluasan akses pasar baru bagi eksportir dengan mencari pasar baru
6. Peningkatan daya saing produk.
7. Peningkatan koordinasi untuk program dan kegiatan yang sinergis sehingga lebih efisien dan efektif.
8. Meningkatkan misi dagang terstruktur multi sektoral didasari dengan Updating Pemetaan komoditas dan jasa unggulan beserta diversifikasinya dengan meningkatkan nilai tambah relatif tinggi (via industrialisasi) dan mekanisme Standardisasi komoditas dan profesi bertaraf Internasional.
9. Peningkatan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri yang bersumber dari produk lokal

Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah :

1. Terbatasnya akses pelaku usaha bidang perdagangan kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.
3. Program pembangunan industri Provinsi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pembangunan secara regional dan nasional untuk itu perlu ada Rencana Induk
4. Globalisasi dan Regionalisasi kerjasama ekonomi dapat menjadi pangsa pasar yang potensial untuk produk-produk industri serta investasi daerah
5. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki daerah

Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah :

1. Masih terbukanya peluang khususnya bagi produk kerajinan, kesempatan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Adanya dukungan dan pendampingan usaha serta peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar. Pesatnya perkembangan informasi teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha

2. Tingginya tingkat ketersediaan potensi sumberdaya alam sebagai bahan baku dalam melakukan produktivitas perdagangan yang berorientasi ekspor
3. Pemantapan dan pendalaman struktur industri seyogyanya diwujudkan melalui sinergitas program antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dengan tetap mengacu kepada RPIP dan RPIK
4. Penguatan daya saing produk daerah melalui gerakan perbaikan mutu produk dan mutu Sumber Daya Manusiadalam rangka standardisasi
5. Pengembangan kreatifitas dan inovasi para pengusaha (termasuk IKM) melalui pendaftaran HKI, Fasilitasi Halal terhadap produk pangan serta fasilitasi SNI

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Pada rancangan awal RKPD telah dilakukan review mengenai analisis kebutuhan, yang mana setelah dilakukan review ada keterkaitan dengan pengalokasian kebutuhan dana masing-masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses sesuai perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai target.

Rancangan awal RKPD ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dari sisi lokasi kegiatan maupun anggaran, sebagai contoh perubahan lokasi kegiatan yang berubah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, hal ini juga telah melalui proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anggaran sehingga apa yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Pada bagian ini dapat kami review rancangan awal RKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 2.3 (menurut Tabel T-C.31 pada lampiran Permendari 86 Tahun 2017) berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				101.720.189.134	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				122.406.979.134
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.532.013.584	03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.646.300.877
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.925.000	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.125.000
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	200.925.000	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	55.125.000
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.769.028.829	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.769.028.829
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	10.729.028.829	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	10.729.028.829
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000
3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				145.000.000	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				145.000.000
3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	145.000.000	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	145.000.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.000.000	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.112.000
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	55.000.000	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	87.112.000
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.103.409.372	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.767.266.000
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	523.559.372	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	550.000.000
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	75.000.000	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	75.000.000
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.000.000	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	386.850.000	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.012.266.000
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				772.784.845	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000
3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palangka Raya	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	525.000.000	3.30.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	250.000.000
3.30.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	247.784.845	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.072.769.048

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.676.265.538	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	380.000.000
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	363.540.000	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.677.769.048
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.297.725.538	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.500.000.000
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				809.600.000	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	300.000.000
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	262.100.000	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	50.000.000
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	37.500.000	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.150.000.000
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	510.000.000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				50.000.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				50.000.000	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			1 Dokumen	25.000.000
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			1 Dokumen	25.000.000	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	25.000.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	25.000.000	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				25.000.000
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				25.000.000	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	25.000.000
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	25.000.000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				85.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				54.586.100	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				85.000.000
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				54.586.100	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	35.000.000
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	29.286.100	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Luar Daerah	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	1 Orang	50.000.000
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Luar Daerah	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	1 Orang	25.300.000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				97.808.974.257
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				76.392.562.750	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				66.918.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				96.630.000	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	55.000.000
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	55.000.000	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	11.918.000
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	41.630.000	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				97.692.056.257
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				76.269.302.750	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	65.000.000
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	51.800.000	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	97.627.056.257
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	76.217.502.750	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				50.000.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				26.630.000	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	50.000.000
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	26.630.000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				2.024.960.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				3.488.950.000	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				2.024.960.000
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				3.488.950.000	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	1.350.000.000
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	2.069.400.000	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	550.000.000
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	1.181.500.000	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	1 Produk	124.960.000
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	1 Produk	238.050.000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				2.818.244.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				3.228.576.700	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				690.856.000
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.073.530.000	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	650.856.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	1.033.530.000	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	5 Pengaduan	40.000.000
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	5 Pengaduan	40.000.000	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.657.888.000
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.687.082.650	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Luar Daerah	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	800 Sertifikat	135.000.000
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Luar Daerah	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	800 Sertifikat	132.500.000	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 Laporan	1.332.888.000
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 Laporan	1.379.829.650	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Kabupaten/ Kota	Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk	75.000.000
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Kabupaten/ Kota	Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk	63.400.000	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	2 Sertifikat	115.000.000
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	2 Sertifikat	111.353.000	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota				469.500.000
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota				467.964.050	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	354.500.000
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	354.500.000	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus yang Ditangani	5 Kasus	115.000.000
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus yang Ditangani	5 Kasus	113.464.050	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				973.500.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				973.500.000	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				516.650.000
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				516.650.000	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Luar Daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	2 UMKM	516.650.000
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Luar Daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	2 UMKM	516.650.000	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				300.000.000
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				300.000.000	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Palangka Raya	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 UMKM	300.000.000
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Palangka Raya	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	2 UMKM	300.000.000	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				156.850.000
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				156.850.000	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	156.850.000
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	156.850.000	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				16.160.000.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				41.846.790.000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				15.795.000.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				41.302.200.000	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi		15.795.000.000
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi		41.302.200.000	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	185.000.000
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	188.600.000	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	6.625.000.000
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2.653.600.000	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	8.985.000.000
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	38.460.000.000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				115.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				113.400.000	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				115.000.000
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				113.400.000	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	50.000.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	50.000.000	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	65.000.000
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	63.400.000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				250.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				431.190.000	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				250.000.000

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				431.190.000	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	250.000.000
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	431.190.000						
Jumlah					143.566.979.134						138.566.979.134

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pemantapan struktur ekonomi daerah.

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkokoh struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan kemasadepan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan daya saing tinggi.

Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel 2.4 (menurut Tabel T-C.32 pada lampiran Permendari 86 Tahun 2017) berikut :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				
1	Pengadaan Alat Cetak Paving Stone	Katingan, Gunung Mas dan Palangka Raya	Tersedianya alat cetak paving stone	1 Paket	
2	Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras	Seruyan	Tersedianya mesin jahit dan mesin obras	1 Paket	
3	Pengadaan Alat Pertukangan Kayu	Seruyan	Tersedianya alat pertukangan kayu	1 Paket	
4	Pengadaan Mesin Cetak Batako	Katingan	Tersedianya mesin cetak batako	1 Paket	
5	Pengadaan Mesin Press Batako	Lamandau	Tersedianya mesin press batako	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang sejalan dengan RPJPN yang merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Selain itu juga diamanatkan bahwa setiap Gubernur untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah mendorong tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang akan disusun Rancangan Peraturan Daerahnya. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong disusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.

Pembangunan Provinsi Kalteng telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJPD 2005-2025 yang fokus tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengarah pada pementapan struktur ekonomi melalui optimalisasi investasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah.

Penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh *stakeholders* untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan industri dan perdagangan belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap kantong-kantong industri yang ada di daerah pedesaan serta embrio pasar sebagai pusat perbelanjaan masyarakat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

Prioritas pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya Kawasan Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga sebagai berikut :

a. Perdagangan

Kondisi umum dalam dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional antara lain kenaikan harga

minyak mentah, krisis keuangan global yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting ditandai dengan munculnya keunggulan ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran dalam pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja, terciptanya intensitas koordinasi antar fasilitator pusat dan daerah dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar dan pembinaan sektor informal. Dengan berbagai permasalahan, maka dalam arah kebijakan perdagangan Indonesia diharapkan :

- 1) Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
- 2) Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- 3) Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.
- 4) Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- 5) Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Sedangkan arah kebijakan nasional di sektor perdagangan yang diprioritaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor.
- 2) Peningkatan Penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik.

b. Industri

Pembangunan industri saat ini bukan hanya merupakan suatu potensi yang hanya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi harus mampu memberikan kontribusi yang besar ke arah modernisasi kehidupan masyarakat dalam menunjang pembentukan daya saing nasional.

Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka menengah bukan hanya sekedar untuk mengatasi permasalahan pokok dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh :

- 1) Ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponennya.
- 2) Keterkaitan antara sektor industri dan dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah.

- 3) Struktur industri yang hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek.
- 4) Ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri.
- 5) Lebih dari 60 % kegiatan sektor industri terletak di Pulau Jawa.
- 6) Masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian, tetapi juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional yang meliputi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya sektor infrastruktur, tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dimana pembangunan industri untuk lima tahun kedepan, pemerintah telah menyusun kebijakan pembangunan industri nasional yang komprehensif dan disepakati seluruh potensi bangsa agar segera dapat mewujudkan terbangunnya industri nasional yang tangguh dan maju dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Dalam kebijakan tersebut diperlukan dalam pembangunan industri secara terintegritas dan sinergi diantara pemangku kepentingan utamanya pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dalam pembangunan daya saing, membangun kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kompetensi inti daerah disektor industri antara lain melalui pembangunan kawasan industri serta membangun potensi inti tersebut berdasarkan keunggulan komparatif.

3.2. Penyelarasan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah wajib mengacu pada Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan menyelaraskan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Terpilih. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ialah “Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (Lima) misi berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal.
2. Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat.
3. Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.

4. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.
5. Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mengemban tugas untuk tercapainya Misi 1 (Satu), yaitu “Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal”. Tujuan dari Misi 1 (Satu) ini adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung pembangunan. Dengan sasaran Menguatnya stabilitas ekonomi daerah dan integrasi ekonomi.
2. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dengan sasaran Terwujudnya pengembangan produk dan industri unggulan daerah melalui hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru dan Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penyelarasan Program Prioritas Huma Betang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Betang Maju, masuk ke dalam poin 3 (Tiga) yaitu Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif, program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Betang Makmur, masuk ke dalam poin 2 (Dua) yaitu Operasi Pasar Murah, program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Betang Makmur, masuk ke dalam poin 3 (Tiga) yaitu 250 Miliarder Muda Baru, program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, yaitu dengan melaksanakan Pelatihan IKM Berkah Naik Kelas.

Penyelarasan Kartu Huma Betang Sejahtera pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun adalah sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Sembako Murah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah di setiap desa, terutama di wilayah rawan pangan.
2. Akses Lapangan Kerja, dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan IKM dan Pelatihan Vokasional.

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

A. Tujuan :

1. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
2. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
3. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
4. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu
5. Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian
6. Peningkatan standar pelayanan publik
7. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
8. Menjadikan pengusaha dan masyarakat yang terampil dalam pengolahan barang industri berbasis agro.
9. Mendorong perkembangan industri kecil dan menengah yang
10. Mendorong ekspor non migas Kalimantan Tengah.
11. Menurunkan peredaran barang dan jasa yang merugikan konsumen serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam penggunaan alat terkalibrasi
12. Menurunkan peredaran barang yang tidak menggunakan tanda SNI.
13. Mendorong produk unggulan yang bersaing di pasar nasional dan internasional.
14. Menciptakan mitra usaha yang saling menguntungkan antara Pelaku usaha;
15. Peningkatan kelembagaan dan sarana perdagangan;
16. Tersedianya data sektor industri dan perdagangan.

B. Sasaran

1. Terwujudnya kestabilan harga barang pokok dan barang strategis
2. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya kemandirian pengusaha dan pengrajin yang berbasis agro industri.
4. Meningkatnya nilai ekspor non migas.
5. Terciptanya peredaran barang dan jasa yang aman terkendali serta meningkatnya kesadaran penggunaan alat yang terkalibrasi secara tertib dan benar.

6. Terwujudnya peredaran barang dipasaran yang bertanda SNI.
7. Meningkatnya jumlah ekspor produk unggulan daerah.

**Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah**

Tujuan	SasaranRenstra	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024 (n-1)	Target 2025 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	a. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB b. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	a. 15,29 % (TW III 2024) b. 1,21 % (TW III 2024)	a. 16,30 % b. 6,15 %
Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Meningktanya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah	a. Pertumbuhan Sektor Perdagangan b. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	a. 5,92 % (TW III 2024) b. 12,64 % (TW III 2024)	a. 7,45 % b. 13,80 %
	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	a. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	a. 6,64 %	a. 4,00 %
	Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng	a. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalteng b. Pertumbuhan Ekspor Non Migas	a. US \$ 3.551 Juta (November 2024) b. -18,79 % (November 2024)	a. US \$ 1.969 Juta b. 5,75 %
	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Pengaduan konsumen terkait barang dan jasa yang ditindaklanjuti b. Peningkatan sampel produk yang memenuhi standar uji mutu	a. 100 % b. 1,65 %	a. 100 % b. 12,72 %

3.4. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dirumuskan pada Rencana Kerja Tahun 2026 ini terdiri dari 10 program dan 24 kegiatan yaitu :

Urusan Perdagangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, kegiatan :
 - a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, kegiatan :
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kegiatan :
 - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
 - b. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
5. Program Pengembangan Ekspor, kegiatan :
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
 - b. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - c. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Urusan Perindustrian

- 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, kegiatan :
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
- 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, kegiatan :
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan perwujudan pembangunan secara konsisten serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan Sasarannya, diperlukan adanya keterpaduan di dalamnya sehingga rencana program dan kegiatan yang mampu merealisasikan arah pembangunan tersebut.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 10 program dengan 24 kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar di 14 kabupaten/kota dan di luar Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/020/TAPD/2025, Tanggal 26 Juni 2025, Tentang Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026, pagu anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 138.566.979.134,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Rencana Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas merupakan hasil rumusan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang pada saat perumusannya telah melibatkan Kabupaten/Kota dan stakeholders melalui kegiatan koordinasi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah diarahkan/ditentukan pada dasarnya membutuhkan anggaran yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Selanjutnya apabila rencana program dan kegiatan yang berkinerja tersebut kurang mendapatkan dukungan dari anggaran yang akan dialokasikan, maka dalam hal ini tidak akan mengurangi kuantitas program dan kegiatan, namun akan mengurangi tolok ukur kegiatan dari kegiatan yang telah direncanakan.

Pada pelaksanaannya selanjutnya Dinas akan memperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Pada implementasinya berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas.
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah akan benar-benar menggunakan dan /atau memperhatikan Rencana Kerja yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas terutama dalam pencapaian kinerja kegiatan.

- c. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas akan menjadi /merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) /Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- d. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan memperhatikan proses pelaksanaannya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja, Dinas selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Rencana selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan program.
- f. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tabel 4.1 berikut ini memuat rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sebagaimana Tabel T-C.33 pada lampiran Permendari 86 Tahun 2017.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Provinsi Kalimantan Tengah

PD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				122.406.979.134	APBD	
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.646.300.877		
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.125.000		
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	55.125.000		
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.769.028.829		
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	53 Orang/ Bulan	10.729.028.829		
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	20.000.000		
3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	20.000.000		
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				145.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	145.000.000		
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.112.000		
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	5 Orang	87.112.000		
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.767.266.000		
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	20.000.000		
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	2 Paket	550.000.000		
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	80.000.000		
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palangka Raya	2 Dokumen	75.000.000		
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	1 Laporan	30.000.000		
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	2 Laporan	1.012.266.000		
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000		
3.30.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palangka Raya	7 Unit	250.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.072.769.048		
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	1 Laporan	15.000.000		
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	1 Laporan	380.000.000		
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Laporan	3.677.769.048		
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.500.000.000		
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		23 Unit	300.000.000		
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	50.000.000		
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	1.150.000.000		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				50.000.000		
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			1 Dokumen	25.000.000		
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	25.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				25.000.000		
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	25.000.000		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				85.000.000		
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				85.000.000		
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Palangka Raya	1 Unit	35.000.000		
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Luar Daerah	1 Orang	50.000.000		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				97.808.974.257		
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				66.918.000		
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	55.000.000		
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	11.918.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				97.692.056.257		
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	65.000.000		
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	97.627.056.257		Mendukung Program Prioritas Huma Betang, Program Betang Makmur, Operasi Pasar Murah
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				50.000.000		
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	50.000.000		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				2.024.960.000		
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				2.024.960.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Luar Daerah	2 Pelaku Usaha	1.350.000.000		
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Luar Daerah	2 Pelaku Usaha	550.000.000		
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Kabupaten/ Kota	1 Produk	124.960.000		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				2.818.244.000		
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				690.856.000		
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Kabupaten/ Kota	1 BPSK	650.856.000		
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Kabupaten/ Kota	5 Pengaduan	40.000.000		
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1.657.888.000		
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Luar Daerah	800 Sertifikat	135.000.000		
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	1.332.888.000		
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	Kabupaten/ Kota	3 Produk	75.000.000		
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Dalam dan Luar Daerah	2 Sertifikat	115.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota				469.500.000		
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	354.500.000		
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kabupaten/ Kota	5 Kasus	115.000.000		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				973.500.000		
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				516.650.000		
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Luar Daerah	2 UMKM	516.650.000		
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				300.000.000		
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Palangka Raya	2 UMKM	300.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				156.850.000		
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten/ Kota	1 Laporan	156.850.000		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				16.160.000.000	APBD	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				15.795.000.000		
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi			15.795.000.000		
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	185.000.000		Mendukung Program Prioritas Huma Betang, Program Betang Maju, Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Palangka Raya	2 Dokumen	6.625.000.000		
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	8.985.000.000		
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				115.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				115.000.000		
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	50.000.000		
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	65.000.000		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				250.000.000		
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				250.000.000		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	250.000.000		
Total					138.566.979.134		

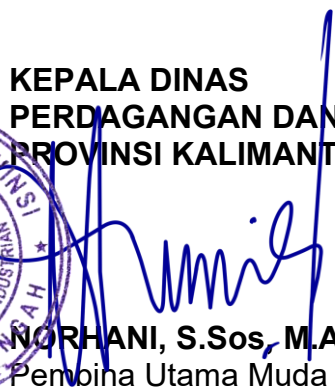
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor perdagangan dan industri sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*Stake Holder*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja ini selain menjadi rancangan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 berfungsi pula sebagai rancangan sarana peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Rencana Kerja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini disusun merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan upaya untuk mendukung visi tersebut diatas, dijabarkan dalam misi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggerakkan sektor perdagangan dan industri yang berbasis sumber daya lokal untuk menjadikan Kalimantan Tengah Berkah, Kalimantan Tengah Maju.

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

NORHANI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670626 199003 2 009